

BAB IV

**PENGARUH PENDANAAN PARTAI POLITIK MELALUI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2014
TERHADAP AKTIVITAS PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SLEMAN**

A. Partai Politik Peserta PEMILU Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sleman

Pada tahun 2014 PEMILU Legislatif dan PILPRES tidak diselenggarakan serentak seperti tahun 2019, PEMILU Legislatif diselenggarakan terlebih dahulu pada tanggal 9 April 2014 sedangkan PEMILU PILPRES diselenggarakan 3 bulan setelahnya pada tanggal 9 Juli 2014.¹

Dikabupaten Sleman sendiri Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 diikuti oleh 15 Partai politik, antara lain :

- Partai Golongan Karya
- Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
- Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- Partai Demokrat
- Partai Amanat Nasional (PAN)
- Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

¹ Kumparan, 7 Perbedaan Pemilu 2014 dan 2019, 22 Juni 2019, <https://kumparan.com/@kumparannews/7-perbedaan-pemilu-2014-dan-2019-1542626775313123571>, (11.33)

- Partai Bulan Bintang (PBB)
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

B. Hasil Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman

Pada tahun 2014, Pemilihan anggota legislatif di langsung di Kabupaten Sleman. Calon-calon anggota DPRD tersebut melakukan cara-cara dalam meyakinkan hati masyarakat untuk memilih dirinya dalam perebutan 50 kursi di DPRD Kabupaten Sleman. Ada yang melakukan kampanye aktif dari satu panggung ke panggung lain, melakukan kegiatan sosial seperti pertemuan-pertemuan, atau pun sekedar menyambangi lokasi-lokasi masyarakat dalam rangka mendekati diri sambil melemparkan janji-janji seumpama mereka terpilih nanti. Dan itulah realita demokrasi di Indonesia ini.

Berdasarkan buku DATA HASIL PEMILU 2014 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang di terbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Sleman pada pemilu Tahun 2014 ialah Sebagai berikut :

Tabel 1

Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Sleman

Pemilu Tahun 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI NASDEM	5	41.192
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	73.120
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6	59.288
4	PDI PERJUANGAN	12	144.636
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	42.722
6	PARTAI GERINDRA	7	75.175
7	PARTAI DEMOKRAT	1	27.721
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	86.795
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	48.621
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	11.066
11	PARTAI BULAN BINTANG	0	3.642
12	PARTAI KEADILAN DAN KESATUAN INDONESIA	0	818

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan data tersebut jumlah suara sah dari hasil pemilu DPRD Kabupaten Sleman berjumlah 614.796 surat suara. Jumlah tersebut dibagi untuk memperebutkan jatah 50 kursi yang ada². Yang berarti untuk mendapatkan 1 kursi dibutuhkan 12.295 suara dari hasil pemilihan tersebut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapatkan suara terbanyak dengan 144.636 suara dan berhak mendapatkan jatah 12 kursi. Berbeda dengan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Bulan Bintang(PBB) dan Partai Keadilan Kesatuan Indonesia(PKPI) yang gagal mendapat jatah kursi di DPRD Kabupaten Sleman karena jumlah suara yang di dapatkan masih dibawah batas minimal 12.295 suara sah.

Setiap partai politik mempunyai daya tarik dan ideologinya masing-masing dalam menarik simpati masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui partai tersebut. Termasuk aspirasi-aspirasi dari anggota partai politik tersebut agar bersinergi dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Maka dari itu jumlah suara yang di dapat oleh partai politik di Kabupaten Sleman tergolong sama dengan di daerah-daerah lain di Indonesia. Dimana suara

² KPU DIY, *Data hasil PEMILU 2014 daerah Istimewa Yogyakarta, KPU DIY*

Legislatif mereka akan bergantung kepada siapa calon legislatif yang akan mereka usung pada pemilihan tersebut. Ini menyebabkan naik turunnya elektabilitas suara partai politik di Kabupaten Sleman khususnya. Salah satu cara agar partai politik mendapatkan simpati dari masyarakat adalah dengan Pendidikan Politik dari Partai politik itu sendiri. Agar tercipta lingkungan politik yang santun antar masyarakat dan calon legislatif dari partai politik itu sendiri.

Berikut pemetaan Daerah Pemilihan dan Penetapan Kursi DPRD Kabupaten Sleman adalah :

Tabel 2

Pemetaan Daerah Pemilihan dan Penetapan Kursi DPRD Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Dapil	Alokasi kursi		Total alokasi kursi
				Tahap 1	Tahap 2	
1	Sleman	68.052	Sleman 1	7	-	7
	Tempel	56.593				
	Turi	33.904				
	Sub Total	158.549				
2	Ngaglik	108.422	Sleman 2	7	1	8

	Pakem	35.818				
	Cangkringan	31.062				
	Sub Total	175.302				
3	Ngemplak	57.802	Sleman 3	8	-	8
	Kalasan	76.752				
	Prambanan	52.663				
	Sub Total	187.217				
4	Depok	144.636	Sleman 4	9	-	9
	Berbah	55.448				
	Sub Total	200.084				
5	Mlati	98.627	Sleman 5	8	1	9
	Gamping	95.179				
	Sub Total	193.806				
6	Godean	71.707	Sleman 6	8	1	9
	Moyudan	32.421				

	Minggir	36.349				
	Seyegan	47.245				
	Sub Total	187.722				
	Total	1.102.680				

Sumber: KPU Kabupaten Sleman

Dari ke 15 (lima belas) partai politik yang berlaga di Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Sleman penulis akan menganalisis 3 partai yang dengan didasari oleh :

1) Besaran jumlah dana yang di terima partai,

Jumlah dana yang diterima partai tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil mengingat perbedaan jauh dari partai dengan suara terbanyak pertama dan yang kedua, hal ini untuk melihat seberapa besar dana yang di salurkan berpengaruh terhadap aktivitas partai.

2) Partai yang bersedia menjadi sumber penelitian,

Dari beberapa partai yang telah penulis datangi untuk meminta izin penelitian ada beberapa partai yang menolak dengan alasan yang beragam seperti PDIP, Golkar dan Demokrat.

3) Partai yang bernafaskan islami

Dengan dasar memilih partai yang bernafaskan islami penulis berharap ada perbedaan dalam aktivitas dengan nafas islami di negara

yang mayoritas beragam islam dengan 2 partai sebelumnya yang berasing nasional, terutama dalam masalah pendidikan politiknya.

Partai-partai tersebut adalah :

1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Partai yang mengusung gambar Garuda sebagai logo Partainya ini terbentuk dan di deklarasikan pada 6 Februari 2008, berawal dari tahun 2007 melalui pembahasan politik seorang Fadli Zon yang saat itu berbincang dengan Hashim Djojohadikusumo yang selanjutnya muncul gagasan-gagasan untuk membentuk partai baru dengan tujuan memberikan haluan baru dan harapan baru agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja³.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Sleman mempunyai struktur kepengurusan yang terdiri dari 19 orang antara lain :

Tabel 3

Penyempurnaan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan

Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sleman tahun 2018

NO	Jabatan	Nama
1.	Ketua	H.R.SUKAPTANA

³ Partai Gerindra, Sejarah partai Gerindra, 19 juni 2019, <http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra..> (23.11)

2.	Wakil Ketua	HUSNI HERIYANTO,SIP
3.	Wakil Ketua	SUBANDI KUSUMA,SH
4.	Wakil Ketua	GITO SUJARWO
5.	Wakil Ketua	SUGIYANTO
6.	Wakil Ketua	Ny.FARIDA FUATWATI
7.	Wakil Ketua	MUHAMMAD JAMIL
8.	Wakil Ketua	SHODIQL QIYAR
9.	Wakil Ketua	Ny.ISTINI
10.	Wakil Ketua	DALHAR
11.	Sekretaris	MUHAMMAD ARIF PRIYOSUSANTO,S.SI
12.	Wakil Sekretaris	Ny.LITA RISTIYANTI,SPd
13.	Wakil Sekretaris	ALEXANDER YOGA BAWONO
14.	Wakil Sekretaris	Ny.ARLIES INANG TRISNAWATI
15.	Bendahara	SUKARJO
16.	Wakil Bendahara	SARJITO,SE

17	Wakil Bendahara	Ny.DARA AYU SUHARTO
18.	Wakil Bendahara	Ny.SUKMA SARI REJEKI
19.	Wakil Bendahara	MUDHORIANDHOKO

Sumber: Dewan Pengurus Daerah Partai Gerindra Kab.Sleman

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK) yang berawal dari Gerakan Dakwah Kampus yang menyebar di universitas-universitas di Indonesia pada tahun 1980, gerakan yang dipelopori oleh Muhammad Natsir, Mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi (Dibubarkan pada 1960) yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967.⁴

Pada rezim orde baru munculah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang terbentuk beranggotakan jamaah Tarbiyah dari Lembaga Dakwah Kampus. KAMMI menjadi salah satu organisasi yang terbilang vocal menggemakan reformasi melawan Soeharto, dipimpin oleh Fahri Hamzah. Setelah Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, Para tokoh KAMMI mempertimbangkan untuk membentuk sebuah partai Islam. Partai tersebut diberi

⁴ Devita retno, Sejarah partai PKS, 5 April 2019, <https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-partai-pks..> (08.30)

nama Partai Keadilan (PK). Walaupun tokoh elit KAMMI memiliki sumbangsih dalam terbentuknya PK, KAMMI dan PK secara tegas mnyatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan formal⁵.

Pada Pemilu Legislatif Indonesia 1999, PK mendapat sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional dan mendapat tujuh kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2% (dua persen). Kegagalan tersebut membuat PK harus menuruti regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama⁶.

Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM. Dan pada hari selanjutnya Partai Keadilan (PK) resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).⁷

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Sleman mempunyai struktur kepengurusan yang terdiri dari 22 orang, antara lain :

Tabel 4

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sleman

Periode 2017-2020

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

NO	AMANAHAH	NAMA
1	Ketua Umum	Hasto Karyantoro
2	Wakil Ketua Umum	Sofyan Evendy,S.Si.
3	Sekretaris Umum	Ali Imron
4	Bendahara Umum	Ananto Nugroho
5	Bendahara I	Erni Yulastuti
6	Ketua Bidang Kaderisasi	Indra Gumilar,S.Si.
7	Ketua Bidang Pemberdayaan SDM dan profesi	Maryanta
8	Ketua Bidang Kepemudaan	Bagus Kelana
9	Sekretaris Bidang Kepemudaan	Arifiani
10	Ketua Seni Budaya	Cahyo Wibowo Nugroho
11	Sekretaris Bidang Seni Budaya	Endriyani Murtiwati,S.Pd.
12	Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga	Triyanto
13	Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga	Riyanti
14	Sekretaris Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga	Hetty Zulaikah
15	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada	Ribut Lupiyanto
16	Ketua Bidang Hubungan Masyarakat	Silva Asri Nurlerina M

17	Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Hendrawan astono,S.Si.
18	Ketua Bidang EKUNTEK dan Lingkungan Hidup	Nanang Danis Wahyu NW
19	Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah	Yano Fathu Rahman
20	Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lilis Nurhayati
21	Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi kader	RR.Latifah Dwi W,S.Sos
22	Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan	Nanik Rahmawati

Sumber : Dewan Pengurus Daerah Partai Gerindra Kab.Sleman

3. Partai Amanat Nasional (PAN)

Sejarah Berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) tidak lepas dari sosok Amien Rais dalam gerakan reformasi 1998. pasca keberhasilan menumbangkan Orde Baru, Amien Rais dan 49 rekan-rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA) merasa perlu untuk mendirikan partai politik baru untuk meneruskan cita-cita reformasi.⁸

Setelah berhasil turut andil dalam menjatuhkan rezim Orde Baru, Amien Rais (Ketua umum Muhammadiyah saat itu) berkeinginan untuk kembali ke Muhammadiyah.

⁸ Website Partai Amanat Nasional, Sejarah PAN, 19 Juni 2019, <https://www.pan.or.id/sejarah-pan/>, (23.20)

Namun, Amien Rais justru merasa terpanggil melanjutkan perjuangan setelah meruntuhkan rezim Indonesia untuk kembali membangun Indonesia.

Pada awalnya partai politik yang berasaskan Pancasila ini seokat dengan nama Partai Amanat Bangsa (PAB), namun akhirnya berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor⁹.

Dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta, pendeklarasian partai ini dihadiri oleh ribuan massa. Partai ini pada dasarnya adalah partai terbuka, meski sebagian orang menganggapnya partai orang Muhammadiyah karena sosok Amien Rais pada saat itu adalah Ketua Umum Muhammadiyah.¹⁰

Dewan kepengurusan Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman mempunyai struktur kepengurusan yang terdiri dari 49 orang, antara lain :

Tabel 5
Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman
Periode 2017-2022

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Sadar Narima

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

2	Wakil Ketua	Sandro Andriawan
3		Dodik ariyanto
4		Huril Hanifah
5		Nurhidayati
6		Noor Sasongko
7		Ikhsan Abdul Karim
8		Sekarmaji
9		Krisnawati
10		Sutrisno
11		Ida Suryanti
12		Anang Sanjaya
13		Sarjimin Umang Wiroguno
14		Respati Agung sasangka
15		R.Inoki Asmi Purnomo
16		Triyono
17		Raudi Akmal
18		Suwarsono
19	Sekretaris	Arif Kurniawan
20	Wakil Sekretaris	Muhammad Restu Hitmawan
21		Iman Sumarlan
22		Rumit Anggono

23		Arif Hartanto
24		Febriana Mustikaningrum
25		Ridwan Trinugroho
26		Ama Hermawan
27		Susi Listyawati
28		Arnita Rachmawati
29		Irdhon Sayuti
30		Jazim Hamidi
31		Selo Widodo
32		Wahyono
33		Ayu Rahmadhani
34		Purwo Haryanto
35		Zuam Suiba
36		Purnomo Widodo
37		Wahdan Arifudin
38	Bendahara	Aris Suranto
39	Wakil Bendahara	Andri Yuni Astuti
40		Arif Nurman Hakim
41		Rr.Afiati Fatimah
42		Joni Praptomo
43		Hernita syifa damayanti

44		Azkie Nastiti
45		Sugeng Raharjo
46		Sri Rahayu
47		Siti Ika Fadriya
48		Ngadimin
49		Eka Anisa

Sumber : Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional Kab.Sleman

B. Kebijakan Penggunaan dana Partai Politik

“Bantuan Keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik” bunyi dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 9 ayat (1)¹¹

Begitupula dengan jumlah perolehan dana bantuan dari pemerintah daerah kepada parpol sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai Politik yang berbunyi “*Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD*

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 pasal 9 ayat (1)

kabupaten/Kota bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya"¹².

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2014 tentang Panduan Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Banparpol Pasal 24 ayat (2) yaitu minimal 60% (enam puluh persen) untuk Pendidikan Politik dari dana yang diterima. Pada tahun 2017, Kabupaten Sleman memperoleh bantuan keuangan untuk partai politik yaitu sebesar Rp. 1.777,- (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) per suara sah

C. Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan

1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Berdasarkan hasil rekapitulasi pemilu DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014 pada buku Data Hasil PEMILU 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta. Gerindra berhasil mendapatkan suara sebanyak 75.175 suara sah.¹³ Jika dikalkulasi dengan dana bantuan APBD sebesar Rp.1777,- (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) per suara sah maka $75.175 \text{ suara sah} \times \text{Rp.1777} =$

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (3)

¹³ KpuDIY, Op.Cit. hlm. 162

Rp.133.585.975,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). namun dana yang di terima oleh Partai Gerindra dari pemerintah daerah adalah Rp.133.575.975,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).¹⁴

Tabel 6
Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan
Keuangan
Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017

No	Jenis Pengeluaran	Volume kegiatan	Realisasi (Rp)	Presentase
1	PENDIDIKAN POLITIK			81.49%
	A. Seminar			
	B. Lokakarya			
	C. Dialog Interaktif			
	D. Sarasehan	1	37.329.000	
	E. Workshop ; dan/atau	2	64.798.300	

¹⁴ Sarjito.S.E, wakil bendahara Partai Gerindra Kab.Sleman, dalam wawancara tentang Banparpol di Kantor DPC partai Gerindra Kab.Sleman, 25 Februari 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

	F. Kegiatan pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya	1	6.719.000	
2	OPERASIONAL SEKRETARIAT			18.51%
	- Administrasi umum			
	A. Keperluan ATK			
	B. Rapat internal sekretariat			
	C. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	D. Sewa kantor			
	E. Honor tenaga administrasi sekretariat yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan			
	- Langganan daya dan jasa			
	A. Telepon dan listrik		5.842.366	
	B. Air minum		590.000	
	Jasa pos dan giro			
	Surat menyurat			
	Surat kabar mingguan atau harian		900.000	
	- Pemeliharaan data dan arsip			

	A. Penyimpanan data elektronik		1.371.900	
	B. Penyimpanan data manual			
	- Pemeliharaan peralatan kantor			
	A. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan		3.835.000	
	B. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariatan		10.070.000	
	Jumlah		133.762.616	

Sumber : Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kab.Sleman

Yang berarti DPC Partai Gerindra Kabupaten Sleman telah sesuai dengan ketentuan penggunaan dan Peruntukan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012, yaitu :

- A. Penggunaan kegiatan Pendidikan Politik sebesar Rp.108.846.300,- (seratus delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau 81.49%, dengan demikian jumlah penggunaan dana untuk Pendidikan Politik telah memenuhi proporsi setidaknya 60% dari jumlah bantuan keuangan yang diterima.
- B. Penggunaan dana sisa dari kegiatan pendidikan politik dimaksimalkan untuk membiayai operasional kantor.

C. Penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan penggunaan dana Banparpol

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemilu DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014 pada buku Data Hasil PEMILU 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh suara sebanyak 59.288 suara sah.¹⁵ jika dikalkulasi dengan dana bantuan APBD sebesar Rp.1.777,- (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) per suara sah maka, $59.288 \text{ suara sah} \times \text{Rp.1.777} = \text{Rp.105.354.776,-}$ (seratus lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan yang di terima oleh Partai Keadilan Sejahtera dari pemerintah daerah adalah Rp.105.354.776,- (seratus lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)¹⁶

Tabel 7

Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan

Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera

Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017

¹⁵ Kpu DIY. Loc.Cit

¹⁶ Wahyudi, Wakil bendahara PKS kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PKS kab.Sleman, 12 maret 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

NO	Jenis Pengeluaran	Jenis Kegiatan	Volume kegiatan	Realisasi (Rp)	keterangan
1.	Pendidikan Politik			80.118.600	76.05%
	Seminar				
	Lokakarya				
	Dialog Interaktif	Dialog politik	1		
	Sarasehan	Sarasehan	1		
	Workshop	Workshop	1		
	Kegiatan pertemuan parpol lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi parpol	1. Pelatihan	1		
		2. Training	10		
2.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			25.236.176	23.95%
	1. Administrasi Umum				
	A. Keperluan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis	13	2.083.600	
	B. Rapat internal	Rapat	7	3.949.000	

	Sekretariat	Koordinasi			
	C. Transport				
	D. Sewa Kantor				
	E. Honor tenaga Administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				
	2. Langganan daya dan jasa				
	A. Telepon dan Listrik	Listrik	12	5.287.069	
	B. Air minum sekretariat	Air minum	6	8.140.507	
	C. Jasa pos dan Giro				
	D. Surat menyurat, atau				
	E. Surat kabar mingguan atau	Internet	8	3.412.000	

	Bulanan				
	3. Pemeliharaan data dan arsip				
	A. Penyimpanan data elektronik; dan/atau				
	B. Penyimpanan data manual				
	4. Pemeliharaan peralatan kantor				
	A. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan; dan/atau				
	B. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor	Service	7	9.690.000	
	SALDO			-	

Sumber : Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kab.Sleman

Yang berarti DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sleman telah sesuai dengan ketentuan penggunaan dan Peruntukan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012¹⁷, yaitu :

A. Penggunaan kegiatan Pendidikan Politik sebesar **Rp.105.354.776,-**

(seratus lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) atau **76.05%**, dengan demikian jumlah penggunaan dana untuk Pendidikan Politik telah memenuhi proporsi setidaknya 60% dari jumlah bantuan keuangan yang diterima.

B. Penggunaan dana sisa dari kegiatan pendidikan politik dimaksimalkan untuk membiayai operasional kantor.

C. Penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan penggunaan dana Banparpol

3. Partai Amanat Nasional (PAN)

Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemilu DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014 pada buku Data Hasil PEMILU 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta, Partai Amanat Nasional memperoleh suara sebanyak 86.795 suara sah¹⁸. jika dikalkulasi dengan dana bantuan APBD sebesar Rp.1.777,- (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) per suara sah maka, $86.795 \text{ suara sah} \times \text{Rp.1.777} =$

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012, Loc,Cit

¹⁸ KPU DIY, Loc.Cit

Rp.154.234.715,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dan dan yang di terima oleh Partai Amanat Nasional dari pemerintah daerah adalah Rp.154.234.715,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah)¹⁹

Tabel 8
Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan
Keuangan
Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017

N O	Jenis Pengeluaran	Volume kegiatan	Realisasi (Rp)	Presentase
1	PENDIDIKAN POLITIK			83.51%
	A. Seminar			
	B. Lokakarya			
	C. Dialog Interaktif			
	D. Sarasehan	2	68.329.000	
	E. Workshop ; dan/atau	2	48.788.000	

¹⁹ Aris Suranto, wakil bendahara partai PAN Kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PAN kab.Sleman, 20 Januari 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

	F. Kegiatan pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya	1	10.819.000	
2	OPERASIONAL SEKRETARIAT			16.49%
	- Administrasi umum			
	A. Keperluan ATK			
	B. Rapat internal sekretariat			
	C. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	D. Sewa kantor			
	F. Honor tenaga administrasi sekretariat yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan			
	- Langganan daya dan jasa			
	Telepon dan listrik		5.346.366	
	Air minum		750.000	
	Jasa pos dan giro			
	Surat menyurat			
	Surat kabar mingguan atau harian		980.000	
	- Pemeliharaan data dan arsip			

	A. Penyimpanan data elektronik		1.276.900	
	B. Penyimpanan data manual			
	- Pemeliharaan peralatan kantor			
	A. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan		4.835.000	
	B. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariatan		12.070.000	
	Jumlah		153.194.266	

Yang berarti DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman telah sesuai dengan ketentuan penggunaan dan Peruntukan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012, yaitu :

A. Penggunaan kegiatan Pendidikan Politik sebesar **Rp.127.936.000,-**

(seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

atau **83.51%**, dengan demikian jumlah penggunaan dana untuk

Pendidikan Politik telah memenuhi proporsi setidaknya 60% dari jumlah

bantuan keuangan yang diterima.

B. Penggunaan dana sisa dari kegiatan pendidikan politik dimaksimalkan

untuk membiayai operasional kantor.

C. Penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan penggunaan dana Banparpol.

E. Pengaruh Dana Bantuan Politik Terhadap aktivitas Partai Politik

Dana dan kuasa merupakan dua unsur penting dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, partai politik membutuhkan dukungan dana guna menopang keberlanjutan kegiatan-kegiatan politiknya.²⁰ Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Pasal 10 yaitu kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan :

- Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan hal tersebut partai politik mempunyai kewajiban untuk menggunakan dana bantuan tersebut untuk pendidikan politik sekurang-kurangnya 60% dari total dana bantuan tersebut. Program-program yang dilaksanakan oleh adalah sebagai berikut :

1. Partai Gerakan Indonesia raya (Gerindra)

²⁰ Dewintasari Safitri, Op.Cit. Hlm. 1.

A. Pengaruh pendanaan terhadap aktivitas partai

Penulis melakukan wawancara di kantor Dewan Pimpinan Cabang partai Gerindra dengan bapak Sarjito.SE selaku Wakil Bendahara Dewan pimpinan cabang Partai Gerindra Kabupaten Sleman²¹.

Menurut beliau , pengaruh dari Bantuan dana Partai Politik berpengaruh sangat kecil kepada aktivitas partai Gerindra karena nominal yang didapat relatif kecil. Mengingat banyaknya keperluan partai untuk mendukung kegiatan partai seperti melakukan pelatihan-pelatihan baik terhadap kader maupun masyarakat terkait pendidikan politik. Partai Gerindra mengaku terbantu dalam segi finansial sekitar 10 hingga 15 persen dari total anggaran untuk aktivitas mereka mengingat banyaknya aktivitas partainya. Partai Gerindra sendiri untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat melakukan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat baik berupa seminar dan pengkaderan yang berjenjang. Dimana pelatihan-pelatihan tersebut juga di support oleh pengurus pusat. Ada beberapa jenis pelatihan kader yang sudah partai sudah lakukan hingga 40 angkatan yaitu Kader Pratama, Kader Muda , dan Kader Madya²².

²¹ Sarjito.S.E, wakil bendahara Partai Gerindra Kab.Sleman, dalam wawancara tentang Banparpol di Kantor DPC partai Gerindra Kab.Sleman, 25 Februari 2019. Ijin mengutip telah diberikan

²² Sarjito, S.E, Wakil Bendahara Partai Gerindra Kab.Sleman, dalam wawancara tentang Banparpol di kantor DPC Gerindra Kab.Sleman, 25 Februari 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

Di masa sekarang pelatihan kader tersebut berganti nama menjadi Gerindra Masa Depan yang dilakukan setiap 2 bulan sekali dan sudah mempunyai 11 (sebelas) angkatan dimana 1 angkatan tersebut diikuti sekitar 500 orang se Indonesia. Untuk di tingkat daerah sendiri partai Gerindra sering melakukan sosialisasi visi misi dan tujuan partai.

Beliau mengatakan bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Sleman menyikapi penggunaan minimal 60% dari Dana Bantuan tersebut dengan lebih memfokuskan ke pendidikan politik di bandingkan operasional partai. Partai Gerindra Kabupaten Sleman mengambil jalan aman dengan menggunakan 80% dana tersebut untuk pendidikan politik karena menurut pemahaman mereka dana tersebut lebih di tekankan kepada minimal 60% pendidikan politik tersebut. selebihnya digunakan untuk membiayai operasional partai dengan di bantu dengan iuran fraksi partai Gerindra Sleman sendiri²³.

B. Kendala penerimaan dana bantuan

Bapak Sarjito,SE mengatakan bahwa dana bantuan tersebut kerap kali tidak tepat waktu dalam pencairannya dan tidak sesuai aturan. dari yang beliau tahu bahwa dana bantuan harus cair satu bulan setelah anggaran APBD di ajukan dan

²³ Sarjito.S.E, wakil bendahara Partai Gerindra Kab.Sleman, dalam wawancara tentang Banparpol di Kantor DPC partai Gerindra Kab.Sleman, 25 Februari 2019. Ijin mengutip telah diberikan

disetujui, yang artinya dana seharusnya cair pada bulan Maret atau April²⁴. Namun pada kenyataannya partai Gerindra sering menerima dana bantuan tersebut diatas bulan Agustus, bahkan ada satu kali dana tersebut baru di terima pada tanggal dimana partai harus mengirimkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana tersebut.

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

A. Pengaruh pendanaan terhadap aktivitas partai.

Penulis melakukan wawancara di kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera dengan bapak Wahyudi selaku Wakil Bendahara di Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sleman²⁵.

Menurut beliau, Partai Keadilan Sejahtera merasa terbantu dengan adanya dana bantuan terhadap partai politik. Beliau mengaku partai merasa ada penambahan dana sekitar 25%-35% dari anggaran asli mereka untuk mensukseskan program-program mereka terutama untuk pendidikan politik²⁶. Walau sesulit apapun untuk membukukan laporan pertanggung jawabannya dikarenakan sering

²⁴ Sarjito.S.E, wakil bendahara Partai Gerindra Kab.Sleman, dalam wawancara tentang Banparpol di Kantor DPC partai Gerindra Kab.Sleman, 25 Februari 2019. Ijin mengutip telah diberikan

²⁵ Wahyudi, Wakil bendahara PKS kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PKS kab.Sleman, 12 maret 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

²⁶ Wahyudi, Wakil bendahara PKS kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PKS kab.Sleman, 12 maret 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

terlambatnya dana bantuan tersebut sampai ke partai namun program-program mereka sudah harus dilaksanakan²⁷.

Partai Keadilan Sejahtera menilai dana tersebut cukup membantu dalam kepengurusan partai terutama dalam bidang pendidikan politik. Walaupun sebenarnya dalam masalah keuangan partai, PKS terbiasa untuk membiayai kegiatan partainya melalui dana dari kantong masing-masing anggotanya. Namun dengan adanya bantuan tersebut juga membuat Partai keadilan Sejahtera untuk menambah beberapa kegiatan untuk mendukung pendidikan politik baik untuk masyarakat maupun untuk kadernya.

Partai Keadilan Sejahtera sendiri mempunyai program-program yang sudah tersusun untuk mengakomodasi pendidikan politik bagi masyarakat dan kadernya seperti Training rutin Partai, Training Rutin Kader dan Training Orientasi Partai.

Dari sisi operasional partai juga merasa terbantu setelah mendapat dana bantuan tersebut mulai dari Listrik, Telepon , Internet , Alat Tulis Kantor dan transport partai.

B. Kendala penerimaan dana

Menurut Bapak Wahyudi kendala yang dialami oleh PKS adalah keterlambatan penyaluran dana bantuan tersebut²⁸. Imbas dari keterlambatan

²⁷ Wahyudi, Wakil bendahara PKS kab.sleman, dalam wawancara terkait dengan Banparpol di kantor DPD PKS sleman, 12 Maret 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

penyaluran tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap perencanaan program-program yang telah di susun oleh PKS dalam beraktivitas. Karena pihak partai harus menyediakan dana talangan untuk membiayai kegiatan partai seperti workshop atau seminar sebelum dana tersebut tersalurkan ke partai. Kendala tersebut yang kadang membuat penyusunan pelaporan juga sedikit banyak tersendat karena turut menyesuaikan data penggunaan dana yang sedikit kurang teratur²⁹.

3. Partai Amanat Nasional (PAN)

A. Pengaruh pendanaan terhadap aktivitas partai

Penulis melakukan wawancara di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman dengan bapak Aris Suranto selaku Bendahara di Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman³⁰.

Menurut beliau Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman merasa dana bantuan yang didapat dari pemerintah sedikit banyak membantu finansial partai dalam melaksanakan program-program yang sudah di susun terutama dalam hal pendidikan politik karena memang 60% dana tersebut fungsinya adalah untuk

²⁸ Wahyudi, Wakil bendahara PKS kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PKS kab.Sleman, 12 maret 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

²⁹ Wahyudi, Wakil bendahara PKS kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PKS kab.Sleman, 12 maret 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

³⁰ Aris suranto, wakil bendahara partai PAN Kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PAN Sleman, 20 januari 2019. ijin mengutip telah diberikan

pendidikan politik itu sendiri dan telah diatur oleh undang-undang³¹. Partai PAN mengaku terbantu sekitar 20 sampai 25 persen secara finansial dari total anggaran aktivitas partainya setelah mendapatkan bantuan dana tersebut. Beliau mengatakan dengan adanya ketentuan bahwa minimal 60% dana tersebut dipakai untuk pendidikan politik sudah cukup baik dan membantu masyarakat untuk memperluas wawasan masyarakat dalam berpandangan politik di Indonesia terutama di daerah, baik juga dalam hal pengkaderan partainya namun kecilnya angka yang di terima oleh partai tidak dapat menjangkau masyarakat secara merata mengingat luasnya daerah Sleman sendiri³².

PAN sendiri mempunyai program-program pendidikan politik baik itu untuk masyarakat atau eksternal partai yaitu Sekolah Politik Kerakyatan (SPK), dalam Sekolah Politik Kerakyatan tersebut dikhususkan untuk mahasiswa dan masyarakat luas dan dilakukan selama 1 bulan dengan konsep penerjunan di masyarakat. maupun untuk kader partai yaitu Latihan Kader yang dibuat untuk pelatihan Internal kader-kader partai yang antara lain adalah Latihan Kader Amanat Dasar, Latihan Kader Amanat Madya dan Latihan Kader Amanat Wilayah. Adapun program-program lain yang turut dibiayai oleh dan bantuan tersebut berupa

³¹ Aris suranto, wakil bendahara partai PAN Kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PAN Sleman, 20 januari 2019. ijin mengutip telah diberikan

³² Aris suranto, wakil bendahara partai PAN Kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PAN Sleman, 20 januari 2019. ijin mengutip telah diberikan.

Diskusi publik yang dilakukan secara aktif dalam 3 bulan sekali, bakti sosial, donor darah, dan ambulan gratis.

B. Kendala penerimaan dana

Beliau mengatakan bahwa kendala penerimaan dana bantuan yang dirasakan oleh PAN Kabupaten Sleman hanya pada lambatnya dana tersebut diterima sejak ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini membuat partai sedikit banyak menahan atau menekan besaran anggaran yang akan di keluarkan partai untuk melakukan program-program partai karena faktor dana yang tidak turun tepat waktu. Beliau mengaku dana tersebut kerap di dapat oleh partai pada bulan Agustus atau dengan kata lain terlambat 2 sampai 3 bulan semenjak ditetapkannya besaran dana yang diterima partai oleh pemerintah daerah³³.

F. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis melihat Partai hanya terbantu paling sedikit 10% dan paling banyak 35% dari total anggaran aktivitas partai mereka dan pengaruh dari pendanaan tersebut dirasakan kecil oleh partai-partai tersebut mengingat luasnya wilayah dari Kabupaten Sleman yang merupakan tujuan utama dari diberikannya dana tersebut untuk pendidikan politik tidak dapat di rasakan masyarakat secara merata³⁴.

³³ Aris suranto, wakil bendahara partai PAN Kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PAN Sleman, 20 januari 2019. ijin mengutip telah diberikan

³⁴ Sarjito.SE, Wahyudi, Aris Suranto, wakil bendahara dan bendahara partai Gerindra, PKS dan PAN, dalam wawancara, ijin mengutip telah diberikan.

Kegiatan-kegiatan atau program-program yang telah ditetapkan oleh partai-partai tersebut dalam melaksanakan fungsi penyaluran dana bantuan kepada partai politik adalah antara lain :

- 1) Workshop
- 2) Sarasehan
- 3) Seminar
- 4) Pelatihan kader dan masyarakat

Penggunaan dana bantuan kepada partai politik telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2012 yang mengatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen). Sisa dari dana bantuan tersebut juga telah digunakan untuk kepentingan operasional partai seperti sewa kantor, tagihan listrik, jasa-jasa dan lain-lain.

Namun dengan jumlah yang sedikit dan sering terlambatnya dana bantuan untuk tersalurkan ke partai politik menjadi salah satu kendala bagi partai dalam mengelola keuangan partai dan juga dalam hal pelaporan penggunaan dana bantuan tersebut. Tidak jarang partai harus mencari dana talangan untuk membiayai acara partai dikarenakan dana yang belum tersalurkan kepada mereka.

Hal ini membuat pengaruh pendanaan partai politik melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dirasa kecil oleh partai-partai tersebut.